

EVALUASI PERENCANAAN STRATEGIS TINGKAT KEDEPUTIAN BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL TAHUN 2015-2019

Dwi Irwanti, Sri Agustin, Hanifa

Biro Perencanaan BATAN, Jalan Kuningan Barat, Jakarta Selatan 12710

email: irwanti@batan.go.id

ABSTRAK

EVALUASI PERENCANAAN STRATEGIS TINGKAT KEDEPUTIAN BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL TAHUN 2015-2019. Evaluasi perencanaan strategis merupakan suatu upaya yang membandingkan antara hasil implementasi kebijakan dengan kriteria dan standar yang telah ditetapkan untuk melihat keberhasilannya. Perencanaan strategis berkaitan dengan visi, misi, tujuan, sasaran dan pencapaian organisasi di masa depan serta berkaitan dengan bagaimana organisasi bisa menggerakkan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan tersebut. Pada tingkat kementerian/lembaga, dokumen Renstra K/L harus berpedoman pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), rumusan masalah yang perlu dianalisis, yaitu Visi, Misi, dan keselarasan antara sasaran dan indikator kinerja Renstra BATAN Tahun 2015 – 2019. Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran penyelarasan (*cascading*) dimulai dari visi, misi, sasaran dan indikator antara dokumen Renstra BATAN dengan Renstra Deputy/Sestama menggunakan kriteria SMART-C. Hasil penelitian menunjukkan Persentase indikator Deputy SATN yang memenuhi kriteria SMART-C adalah sebesar 76,47% masih ada 4 indikator yang belum memenuhi seluruh kriteria SMART-C, Deputy TEN sebesar 66,67% masih ada 2 indikator yang belum memenuhi seluruh kriteria SMART-C, Deputy PTN sebesar 86,67% masih ada 2 indikator yang belum memenuhi seluruh kriteria SMART-C, dan Sestama sebesar 46,67% masih ada 8 indikator yang belum memenuhi seluruh kriteria SMART-C. Metodologi pengambilan data menggunakan data sekunder dan pengolahan data menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil kajian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan Pimpinan BATAN dalam merumuskan kebijakan penyusunan Renstra 2020-2024 agar dirancang memenuhi kriteria SMART-C.

Kata kunci: Evaluasi, perencanaan, strategis, kedeputian, sestama, sasaran, indikator

ABSTRACT

EVALUATION OF 2015-2019 DEPUTY OF NATIONAL NUCLEAR POWER STRATEGIC PLANNING. Strategic planning evaluation is an effort that compares the results of policy implementation with established criteria and standards to see its success. Strategic planning is related to the vision, mission, goals, objectives and achievements of the organization in the future and is related to how the organization can mobilize existing resources to achieve these goals. At the ministry / agency level, the K / L Strategic Plan document must be guided by the National Medium-Term Development Plan (RPJMN) document, the formulation of problems that need to be analyzed, namely the Vision, Mission, and alignment between the targets and performance indicators of the 2015-2015 BATAN Strategic Plan. This research is to provide a picture of alignment (*cascading*) starting from the vision, mission, targets and indicators between the BATAN Strategic Plan and the Deputy / First Strategic Plan using the SMART-C criteria. The results showed the percentage of SATN Deputy indicators that met the SMART-C criteria was 76.47% there were still 4 indicators that did not meet all the SMART-C criteria, TEN Deputy was 66.67% there were still 2 indicators that did not meet all the SMART-C criteria C, Deputy PTN of 86.67% there are still 2 indicators that do not meet all the SMART-C criteria, and Sestama of 46.67% there are still 8 indicators that do not meet all the SMART-C criteria. Data collection methodology uses secondary data and data processing uses descriptive qualitative methods. The results of this study are expected to be used as input for BATAN's leadership in formulating policies for the preparation of the 2020-2024 Strategic Plan so that they are designed to SMART-C criteria.

Keywords: Evaluation, planning, strategic, deputy, targets, indicators

PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) merupakan landasan hukum bagi penyusunan perencanaan pembangunan. Tujuan dari SPPN adalah untuk mendukung antar pelaku pembangunan, menjamin integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar daerah, antar waktu dan menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. Secara rinci Undang-Undang SPPN mengatur waktu/periode dokumen sumber perencanaan seperti Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 5 tahun, Rencana Kinerja Pemerintah (RKP) 1 tahun, Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L) 5 tahun, Renja K/L 1 tahun. Pada tingkat kementerian/lembaga, dokumen Renstra K/L harus berpedoman pada dokumen RPJMN.

Perencanaan Strategis, menurut Bryson [1], menjelaskan bahwa *strategic planning* merupakan suatu upaya yang didisiplinkan untuk membuat keputusan dan tindakan penting yang membentuk dan memandu bagaimana menjadi organisasi, apa yang dikerjakan organisasi, dan mengapa organisasi mengerjakan hal tersebut. Adanya perencanaan strategis dapat membantu organisasi untuk berpikir dan bertindak secara strategis. Perencanaan strategis juga dapat membantu organisasi dalam mengantisipasi dan lebih responsive terhadap perubahan lingkungan di sekitarnya. Perencanaan strategis berkaitan dengan apa visi, misi, tujuan, sasaran dan pencapaian organisasi di masa depan serta berkaitan dengan bagaimana organisasi bisa menggerakkan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan tersebut.

Renstra merupakan penjabaran visi K/L dan dilengkapi dengan rencana sasaran nasional yang hendak dicapai dalam rangka mencapai sasaran program prioritas presiden. Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Pasal 6 disebutkan bahwa Renstra K/L memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi K/L. Tugas dan fungsi BATAN telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2013 tentang Badan Tenaga Nuklir Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 113).

Dalam menjamin sinkronisasi dan konsistensi antara Renstra dengan tugas dan fungsi BATAN, Biro Perencanaan (BP) sebagai unit perencana berfungsi mengkoordinasikan dan mensinergikan pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran dan penyiapan sarana dan prasarana penelitian dan pengembangan (litbang) iptek nuklir di BATAN. Hal ini sesuai dengan Peraturan Kepala BATAN Nomor 14 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja BATAN.

Penyusunan Renstra BATAN adalah langkah awal bagi setiap organisasi di dalam pencapaian tujuannya. Tujuan dari Renstra itu sendiri antara lain agar organisasi siap dalam menghadapi hambatan atau tantangan dan kesempatan yang bisa terjadi setiap waktu. Renstra BATAN 2015-2019 merupakan dokumen acuan unit kerja dalam menyusun kegiatan yang lebih rinci dengan keluaran (output) yang jelas dan terukur serta dikendalikan oleh para Deputi/Sestama untuk pencapaian outcome.

Berdasarkan latar belakang di atas, ada beberapa rumusan masalah yang perlu dianalisis, yaitu visi, misi, dan keselarasan antara sasaran dan indikator kinerja. Kajian keselarasan antara sasaran dan indikator kinerja dibatasi pada analisis keselarasan antara sasaran strategis, sasaran program dan indikator, serta penilaian terhadap rumusan indikator.

Kajian ini bertujuan memberi gambaran penyelarasan (*cascading*) sasaran dan indikator antara dokumen Renstra BATAN dengan Renstra Deputi/Sestama. Hasil kajian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan penyusunan Renstra 2020-2024 dan sebagai bahan masukan Pimpinan BATAN dalam merumuskan kebijakan.

TEORI EVALUASI PERENCANAAN STRATEGIS

Evaluasi merupakan salah satu tingkatan di dalam proses kebijakan publik, evaluasi adalah suatu cara untuk menilai apakah suatu kebijakan atau program itu berjalan dengan baik atau tidak. Islamy (2000) dalam safi'i [2] mengatakan bahwa penelitian (evaluasi) kebijakan adalah merupakan langkah terakhir dari suatu proses kebijakan. Salah satu aktivitas fungsional, evaluasi kebijakan tidak hanya dilakukan dengan mengikuti aktivitas-aktivitas sebelumnya, yaitu pengesahan (formulasi) dan pelaksanaan (implementasi) kebijakan, tetapi dapat terjadi pada seluruh aktivitas-aktivitas fungsional yang lain dalam proses kebijakan.

Evaluasi kebijakan dapat mencakup tentang isi kebijakan, pelaksanaan kebijakan, dan dampak kebijakan. Jadi evaluasi kebijakan bisa dilakukan pada fase perumusan masalah,

formulasi usulan kebijakan, implementasi kebijakan, legitimasi kebijakan dan seterusnya. Evaluasi menurut Dunn yang dikutip oleh Riant Nugroho [3] dalam bukunya Kebijakan Publik (Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi) mendefinisikan evaluasi sebagai :

“Evaluasi mempunyai arti yang berhubungan, masing-masing menunjuk pada aplikasi beberapa skala nilai terhadap hasil kebijakan dan program. Secara umum istilah evaluasi dapat disamakan dengan penafsiran (appraisal), pemberian angka (Rating) dan penilaian (Assesment), kata-kata yang menyatakan usaha untuk menganalisis hasil kebijakan dalam arti satuan lainnya. Dalam arti yang lebih spesifik, evaluasi berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan” (Nugroho, 2003:181).

Perencanaan Strategis

Perencanaan [4] bukanlah sekedar menyusun apa yang akan kita kerjakan/lakukan besok, tetapi Perencanaan adalah proses menentukan apa yang akan kita capai besok, yang kemudian baru diikuti dengan apa yang akan kita kerjakan/lakukan untuk mencapainya. Perencanaan [5] adalah salah satu fungsi dari manajemen yang paling penting dimana di dalamnya terdapat aktivitas mendefinisikan tujuan organisasi, membuat strategi, serta mengembangkan rencana kerja organisasi. Manfaat Perencanaan adalah sebagai penuntun arah, meminimalisasi ketidakpastian, meminimalisasi inefisiensi sumberdaya, penetapan standar dan pengawasan kualitas



Gambar 1: Piramida Perencanaan

Rencana Strategis (*Strategis Planning*) adalah salah satu dari perencanaan berdasarkan ruang lingkup yaitu perencanaan yang di dalamnya terdapat uraian mengenai kebijakan jangka panjang dan waktu pelaksanaan yang lama. Umumnya jenis perencanaan seperti ini sangat sulit untuk diubah.

Visi (*Vision*)

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang ingin dicapai oleh Kementerian/Lembaga pada akhir periode perencanaan. Visi memberikan gambaran konsistensi kinerja Kementerian/Lembaga selama 5 (lima) tahun mendatang serta gambaran menyeluruh mengenai peranan dan fungsi suatu organisasi. Adapun dalam penentuan Visi Kementerian/Lembaga, perlu untuk mempertimbangkan beberapa kriteria sebagai berikut: (1) Visi harus dapat memberikan arah pandangan kedepan terkait dengan kinerja dan peranan organisasi. (2) Visi harus dapat memberikan gambaran tentang kondisi masa depan yang ingin diwujudkan oleh organisasi. (3) Visi harus ditetapkan secara rasional, realistis dan mudah dipahami.

Misi (*Mission*)

Menurut The Winning Formula dalam buku *Management Strategic Concept* oleh Fred R. David, (2009, p5). Misi merupakan pernyataan keyakinan (*creed statement*), maksud dan

tujuan suatu organisasi. Komponen misi adalah Pelanggan, Produk dan atau Jasa, Pasar. Teknologi, Perhatian terhadap kelangsungan hidup, Falsafah. Konsep diri, Perhatian terhadap kesan masyarakat (citra publik) dan Fokus pada karyawan.

Adapun dalam penentuan Misi Kementerian/Lembaga, perlu untuk mempertimbangkan beberapa kriteria sebagai berikut: (1) Misi merupakan **Pendukung Visi**. Misi boleh dituliskan hanya dengan satu kalimat jelas, sarat informasi, dan berfokus pada cara pencapaian tujuan. Misi boleh pula dituliskan dengan beberapa kalimat. (2) Misi berisi rangkaian aksi yang akan dilakukan oleh perusahaan, universitas, organisasi, maupun instansi dalam mencapai visi atau mimpi utamanya. an secara singkat, padat dan mudah diingat. (3) Visi harus dapat dilaksanakan secara konsisten dalam pencapaian. (4) Visi harus selalu berlaku pada semua kemungkinan perubahan yang mungkin terjadi sehingga suatu Visi hendaknya mempunyai sifat fleksibel.

Tata (Nilai (Value)

Dalam Kamus Sosiologi yang disusun oleh Soerjono Soekanto disebutkan bahwa Nilai (*value*) adalah konsepsi abstrak di dalam diri manusia, mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk. Horton dan Hunt, 1987 menyatakan bahwa Nilai adalah gagasan mengenai apakah suatu pengalaman itu berarti apa tidak berarti. Nilai ada 3 tiga macam, yaitu: (1) Nilai material, yakni meliputi berbagai konsepsi mengenai segala sesuatu yang berguna bagi jasmani manusia. (2) Nilai vital, yakni meliputi berbagai konsepsi yang berkaitan dengan segala sesuatu yang berguna bagi manusia dalam melaksanakan berbagai aktivitas. (3) Nilai kerohanian, yakni meliputi berbagai konsepsi yang berkaitan dengan segala sesuatu yang berhubungan dengan kebutuhan rohani manusia: nilai kebenaran, yakni yang bersumber pada akal manusia (*cipta*), nilai keindahan, yakni yang bersumber pada unsur perasaan (*estetika*), nilai moral, yakni yang bersumber pada unsur kehendak (*karsa*), dan nilai keagamaan (*religiusitas*), yakni nilai yang bersumber pada revelasi (*wahyu*) dari Tuhan.

Tujuan (Goal)

Menurut Stephen R. Covey Tujuan Organisasi merupakan penjabaran dari Visi dan Misi organisasi. Tujuan organisasi berisi sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan oleh organisasi yang bersangkutan. Tujuan organisasi adalah target yang bersifat kuantitatif dan pencapaian target tersebut merupakan ukuran keberhasilan kinerja organisasi. Tujuan organisasi pada dasarnya berjangka panjang dengan tugas yang harus diselesaikan selama waktu itu dan akan mengarahkan kinerja organisasi.

Menurut Permen PPN/BAPPENAS Nomor 5 tahun 2014 Tujuan disusun berdasarkan hasil identifikasi potensi dan permasalahan yang akan dihadapi pada langkah sebelumnya dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan misi. Pada tingkat organisasi, visi, misi, tujuan dan sasaran strategis berada pada tingkat kinerja dampak (*impact*). Pernyataan tujuan harus dilengkapi dengan sasaran strategis sebagai ukuran kinerjanya. Sasaran strategis dilengkapi dengan target kinerja sehingga menjadi ukuran keberhasilan dari pencapaian visi dan misi Kementerian/Lembaga. Kriteria penentuan Tujuan adalah sebagai berikut: (1) Tujuan harus sejalan dengan visi dan misi organisasi dan berlaku pada periode jangka menengah. (2) Tujuan harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai pada periode jangka menengah. (3) Tujuan harus dapat dicapai dengan kemampuan yang dimiliki oleh. (4) Tujuan harus dapat mengarahkan perumusan sasaran strategis, strategi dan kebijakan, serta program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi.

Sasaran (Objective)

Menurut Stephen R. Covey tujuan utama organisasi dirinci atau dipecahkan menjadi tujuan yang lebih kecil yang disebut sasaran. Sasaran organisasi adalah penjabaran dari tujuan organisasi, yaitu sesuatu yang akan dihasilkan organisasi dalam jangka waktu tertentu. Agar sasaran dapat dicapai dengan efektif dan efisien, maka sasaran organisasi harus dibuat secara spesifik, terukur, jelas kriterianya, dan disertai indikator yang lebih rinci. Untuk memudahkan dalam menentukan sasaran kegiatan, sebaiknya organisasi memiliki sumber daya manusia, sumber daya keuangan, kemampuan menghasilkan manfaat, kebutuhan masyarakat, sarana kerja, pengembangan unit layanan jasa, dan tanggung jawab.

Indikator (*Indicator*)

Menurut **Wilson dan Sapanuchart** indikator adalah ukuran dari sebuah status atau kondisi secara tidak langsung yang telah terjadi. Menurut Buku "Panduan Praktis Menyusun Key Performance Indicator (KPI)" oleh Arini Soemohadiwidjojo, indikator harus: sederhana, mudah untuk dipahami, dimonitor, serta dikelola sehingga cocok untuk dijadikan KPI, indikator kinerja tersebut harus memenuhi kriteria SMART-C sebagai berikut: (1) *Specific* (spesifik): indikator kinerja harus dapat didefinisikan secara spesifik (tidak berdwimakna/multitafsir/ambigu). (2) *Measurable* (terukur): indikator kinerja harus dapat diukur secara obyektif, baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif (dapat diukur, diidentifikasi satuan atau parameternya). (3) *Achievable* (realistis/dapat dicapai): sasaran/target yang ditetapkan untuk indikator kinerja harus masuk akal dan memungkinkan untuk dicapai (dapat dicapai, relevan dengan tuisi (domain) dan dalam kendalinya/controllable). (4) *Relevant* (relevan): indikator kinerja yang dipilih sesuai dengan lingkup bisnis dan aktivitas/proses bisnis organisasi/divisi terkait (terkait langsung dengan apa yang akan diukur atau merepresentasikan). (5) *Timely/Time-Bound* (batasan waktu): pencapaian sasaran/target indikator kinerja memiliki batasan waktu yang jelas (mengacu/menggambarkan kurun waktu tertentu/ada batas waktu). (6) *Continuous Improvement* (perbaikan berkelanjutan): sasaran target indikator kinerja yang ditetapkan merupakan peningkatan dari pencapaian periode sebelumnya dan menjadi tantangan manajemen untuk meningkatkan kinerja organisasi (dari segi jumlah, ukuran keberhasilan yang ada harus cukup mengindikasikan tercapainya tujuan, sasaran dan hasil program).

KPI atau Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah kumpulan atau indikator kinerja suatu organisasi, utamanya dalam mencapai tujuan dan sasaran tertentu. Setiap organisasi pemerintah wajib merumuskan IKU, dan menjadikan hal itu sebagai prioritas utama. IKU dianggap telah memenuhi kriteria SMART-C berdasarkan kesepakatan antara pengelola kinerja organisasi, pemilik IKU dan atasan langsung pemilik IKU.

Strategi (*Strategy*)

Konsep dasar strategi dalam Manajemen Strategis menurut Kuncoro (2005;12) adalah sejumlah keputusan dan aksi yang digunakan untuk mencapai tujuan dan menyesuaikan sumber daya yang dimiliki dengan peluang dan tantangan yang dihadapi dalam lingkungan strategisnya. Ciri-ciri/karakteristik strategi adalah sebagai berikut: (1) *Goal-directed actions*, yaitu aktivitas yang menunjukkan "apa" yang diinginkan organisasi dan "bagaimana" mengimplementasikannya. (2) Mempertimbangkan semua kekuatan internal (sumber daya dan kapabilitas) serta memperhatikan peluang dan tantangan.

Suatu strategi merupakan analisis yang tepat tentang kekuatan yang dimiliki oleh organisasi, kelemahan yang melekat pada organisasi, berbagai peluang yang mungkin timbul dan harus dimanfaatkan serta ancaman yang diperkirakan akan terjadi. Dengan analisis yang tepat alternatif yang dapat ditempuh akan terlihat dan lebih efektif.

Kebijakan (*Policy*)

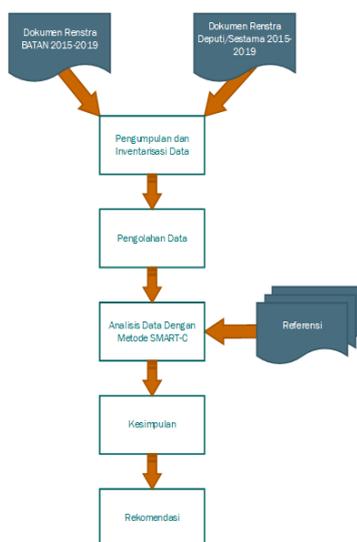
Menurut *The Winning Formula* Kebijakan adalah suatu ucapan atau tulisan yang memberikan petunjuk umum tentang penetapan ruang lingkup yang memberi batas dan arah umum kepada seseorang untuk bergerak. Secara etimologis, kebijakan adalah terjemahan dari kata policy. Kebijakan dapat berarti sebagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Kebijakan dapat berbentuk keputusan yang dipikirkan secara matang dan hati-hati oleh pengambil keputusan puncak dan bukan kegiatan-kegiatan berulang yang rutin dan terprogram atau terkait dengan aturan-aturan keputusan.

METODOLOGI

Kajian ini menggunakan desain penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, kelompok tertentu, atau menentukan frekuensi penyebaran suatu gejala, atau frekuensi adanya pengaruh tertentu antara suatu gejala lain dalam masyarakat (Indriantoro, 1999). Analisis deskriptif yang dilakukan dengan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Pendekatan deskriptif kuantitatif digunakan untuk mendiskripsikan atau menjelaskan peristiwa atau suatu kejadian yang terjadi pada saat sekarang dalam bentuk angka-angka yang bermakna (Sudjana, 2004). Sedangkan analisis data secara kualitatif ditujukan untuk memperkuat analisis deskriptif kuantitatif.

Kajian ini dilaksanakan di Biro Perencanaan Badan Tenaga Nuklir Nasional pada Bulan Januari-Agustus 2019. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder diperoleh dari literatur dan dokumen perencanaan BATAN seperti dokumen rencana strategis BATAN 2015-2019, dokumen rencana strategis Deputi/Sestama BATAN 2015-2019, serta dokumen terkait lainnya.

Kajian diawali dengan pengumpulan dan inventarisasi data. Pengolahan data dilakukan berdasarkan sasaran strategis, sasaran program, indikator kinerja strategis dan indikator kinerja program. Analisis data dilakukan untuk mengetahui keselarasan antara sasaran indikator menggunakan kriteria SMART-C. Hasil analisis selanjutnya dirumuskan berupa rekomendasi sebagai bahan masukan untuk perbaikan penyusunan Renstra BATAN 2020-2024. Untuk mendapatkan rekomendasi kebijakan penyusunan dokumen rencana strategis periode berikutnya, langkah yang dilakukan adalah sebagaimana kerangka alur pikir berikut ini.

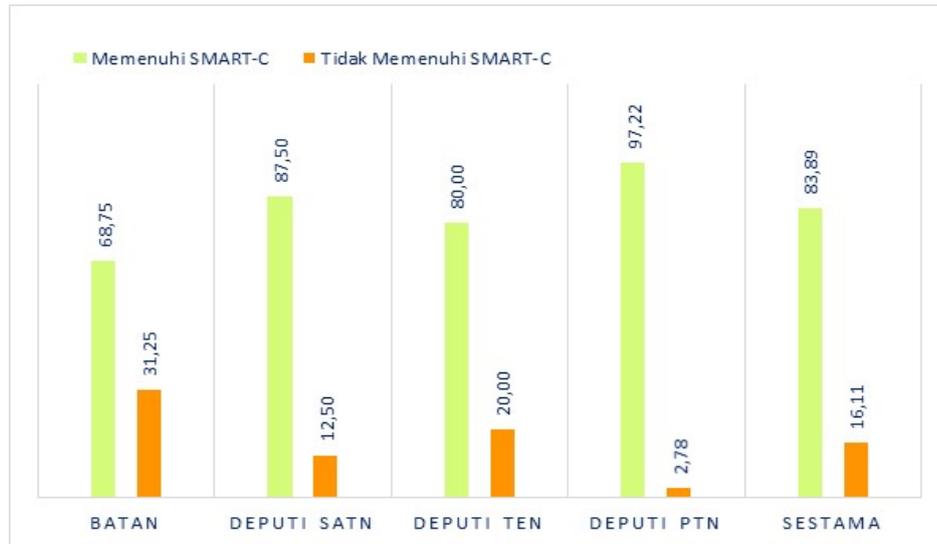


Gambar 2. Kerangka Pikir Dalam Kajian

HASIL DAN PEMBAHASAN

Renstra BATAN 2015-2019 berisi visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan, program/kegiatan, dan indikator kinerja. Renstra BATAN disusun mengacu pada kerangka arah kebijakan dan strategi, terutama terhadap prioritas pembangunan dalam RPJMN 2015-2019 dan berbagai permasalahan di bidang penelitian, pengembangan, perekayasaan dan penerapan iptek nuklir, serta kondisi lingkungan strategis BATAN ke depan. Rumusan Kebijakan Renstra BATAN 2015-2019 dituangkan dalam 2 program yaitu: (1) Program Penelitian Pengembangan dan Penerapan Energi Nuklir, Isotop dan Radiasi. Kegiatan litbang di bidang ketenaganukliran meliputi fokus bidang Pangan/Pertanian, Kesehatan, Energi, SDAL dan Keselamatan Radiasi, Industri, Material Maju, dan (2) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BATAN. Keempatannya di bidang manajemen Kelembagaan. Program 1 dilaksanakan oleh Deputi teknis yaitu: Deputi SATN, Deputi TEN, dan Deputi PTN, sedangkan Program 2 dilaksanakan oleh Sekretaris Utama. Dalam melaksanakan Program masing-masing Deputi dan Sestama memiliki Sasaran Program dan indikator dalam mendukung Sasaran Strategis BATAN.

Analisis dilakukan terhadap sasaran dan indikator dalam Renstra BATAN, Renstra Deputi SATN, Renstra Deputi TEN, Renstra Deputi PTN dan Renstra Sestama tahun 2015-2019. Sasaran dan indikator dinilai berdasarkan kesesuaian/memenuhi kriteria SMART-C. Hasil penilaian atas seluruh sasaran dan indikator disajikan dalam bentuk persentase, sehingga dapat diketahui sasaran dan indikator yang telah memenuhi maupun belum memenuhi kriteria SMART-C. Hasil analisis tersebut akan menjadi bahan evaluasi dalam menyusun sasaran dan indikator Renstra periode berikutnya agar seluruh sasaran dan indikator yang disusun dapat memenuhi kriteria SMART-C.



Gambar 3. Persentase Hasil Penilaian Indikator BATAN dan Eselon I

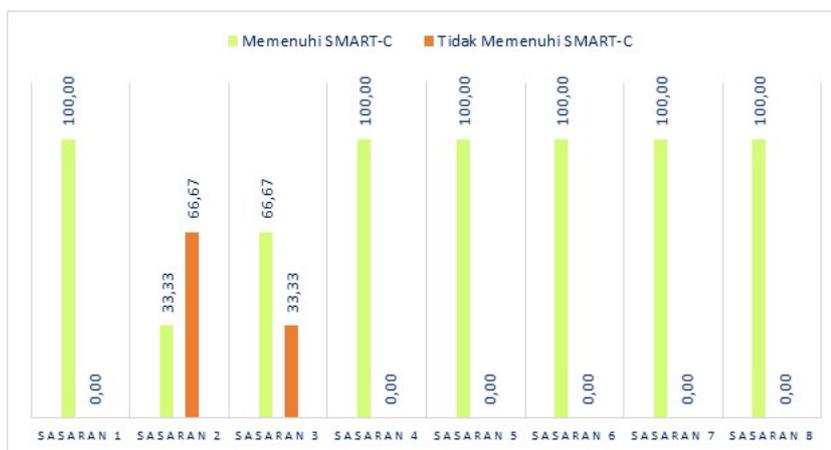
Analisis Keselarasan Antara Indikator dan Sasaran Deputy SATN

Sasaran Renstra Deputy SATN 2015-2019 memiliki 8 Sasaran dan 17 Indikator, disajikan dalam Tabel 1.

Tabel 1 Indikator dan Sasaran Deputy SATN

	SASARAN		INDIKATOR
1	Meningkatnya kepakaran menuju keunggulan BATAN	1	Jumlah pusat unggulan iptek
		2	Jumlah Collaborating Center IAEA
		3	Jumlah publikasi ilmiah pada jurnal terakreditasi
2	Meningkatnya efektivitas diseminasi dan promosi iptek nuklir	4	Jumlah mitra pengguna yang memanfaatkan hasil litbangyasa iptek nuklir
3	Meningkatnya hasil litbangyasa iptek nuklir bidang pangan yang siap dimanfaatkan oleh masyarakat	5	
		6	Jumlah Agro Techno Park (ATP)
		7	Jumlah varietas unggul tanaman pangan
		8	Jumlah teknologi pengelolaan lahan sub-optimal yang siap dimanfaatkan
		9	Jumlah National Science Techno Park (N-STP)
4	Meningkatnya hasil litbangyasa iptek nuklir dalam peningkatan nilai tambah sumber daya alam lokal	10	Jumlah prototipe alat pemisahan logam tanah jarang bebas radioaktif dari monasit
		11	Jumlah prototipe bahan maju berbasis sumber daya alam lokal
5	Meningkatnya hasil litbangyasa iptek nuklir bidang kesehatan yang siap dimanfaatkan oleh masyarakat	12	Jumlah data riset kandungan mikronutrisi bahan pangan dan manusia pada daerah bermasalah malnutrisi yang siap dimanfaatkan
6	Meningkatnya hasil litbangyasa iptek nuklir bidang SDAL yang siap dimanfaatkan oleh masyarakat	13	Jumlah data riset (karakteristik dan jenis sumber) polutan udara Indonesia yang siap dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan
		14	Jumlah data riset epidemiologi akibat paparan radiasi medik dan lingkungan
7	Meningkatnya hasil litbangyasa	15	Jumlah prototipe siklotron proton 13 MeV yang

	SASARAN		INDIKATOR
	iptek nuklir bidang industri yang siap dimanfaatkan oleh masyarakat		siap dimanfaatkan untuk produksi radioisotop
		16	Jumlah metode advanced NDI yang siap dimanfaatkan industri
		17	Jumlah Desain Reaktor Triga-Pelat yang siap untuk digunakan
8	Meningkatnya kualitas layanan BATAN	18	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) layanan pemanfaatan iptek nuklir di bidang energi, isotop dan radiasi

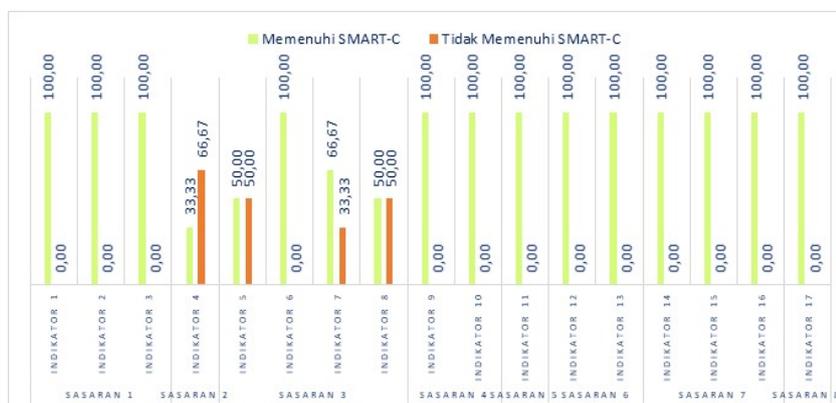


Gambar 4. Persentase Penilaian Sasaran Deputi SATN

Terdapat 6 sasaran dari 8 sasaran memiliki tingkat kesesuaian paling tinggi yaitu sasaran 1, 4, 5, 6, 7, dan 8 sebesar 100%, karena seluruh indikatornya telah memenuhi seluruh kriteria SMART-C. Sedangkan sasaran 2 memiliki tingkat kesesuaian paling kecil sebesar 33,33%. Tingkat kesesuaian sasaran 3 sebesar 66,67%.

Hasil analisis kesesuaian indikator terhadap kriteria SMART-C pada Renstra Deputi SATN menunjukkan 13 dari 17 (76,47%) indikator telah memenuhi seluruh kriteria SMART-C yaitu indikator 1, 2, 3 pada sasaran 1, indikator 6 pada sasaran 3, indikator 9 dan 10 pada sasaran 4, indikator 11 pada sasaran 5, indikator 12 dan 13 pada sasaran 6, indikator 14-16 pada sasaran 7, dan indikator 17 pada sasaran 8.

Indikator yang memiliki tingkat kesesuaian terendah terhadap sasaran kriteria SMART-C pada Renstra Deputi SATN menunjukkan bahwa indikator 4 sebesar 33,33%. Sedangkan kesesuaian rendah lainnya pada indikator 5 dan 8 sebesar 50%, dan indikator 7 sebesar 66,67%. Penilaian indikator Deputi SATN memiliki tingkat kesesuaian rendah antara 33,33% - 66,67%, secara rinci dijelaskan pada Gambar 5.



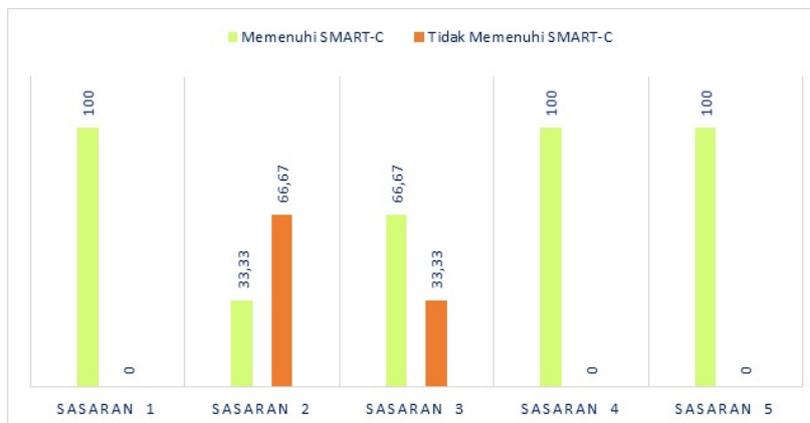
Gambar 5. Persentase Penilaian Indikator Deputi SATN

Analisis Keselarasan Antara Indikator dan Sasaran Deputi TEN

Sasaran Renstra Deputi TEN 2015-2019 memiliki 5 Sasaran dan 6 Indikator, disajikan dalam Tabel 2.

Tabel 2. Indikator dan Sasaran Deputi TEN

	SASARAN		INDIKATOR
1	Meningkatnya kepakaran menuju keunggulan BATAN	1	Jumlah publikasi ilmiah pada jurnal terakreditasi
2	Meningkatnya efektivitas diseminasi dan promosi iptek nuklir	2	Jumlah mitra pengguna yang memanfaatkan hasil litbangyasa iptek nuklir <i>Catatan: Indikator belum muncul dalam dokumen renstra Deputi TEN Rev.1 namun indikator ini sudah tercantum pada PK Deputi TEN sejak tahun 2018</i>
3	Meningkatnya hasil litbangyasa iptek nuklir bidang energi yang siap dimanfaatkan	3	Persentase pembangunan Reaktor Daya Eksperimental
		4	Jumlah dokumen teknis penyiapan infrastruktur pembangunan PLTN
4	Meningkatnya hasil litbangyasa iptek nuklir dalam peningkatan nilai tambah sumber daya alam lokal	5	Jumlah prototipe alat pemisahan logam tanah jarang bebas radioaktif dari monasit
5	Meningkatnya kualitas layanan BATAN	6	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) layanan pemanfaatan iptek nuklir di bidang energi, isotop dan radiasi

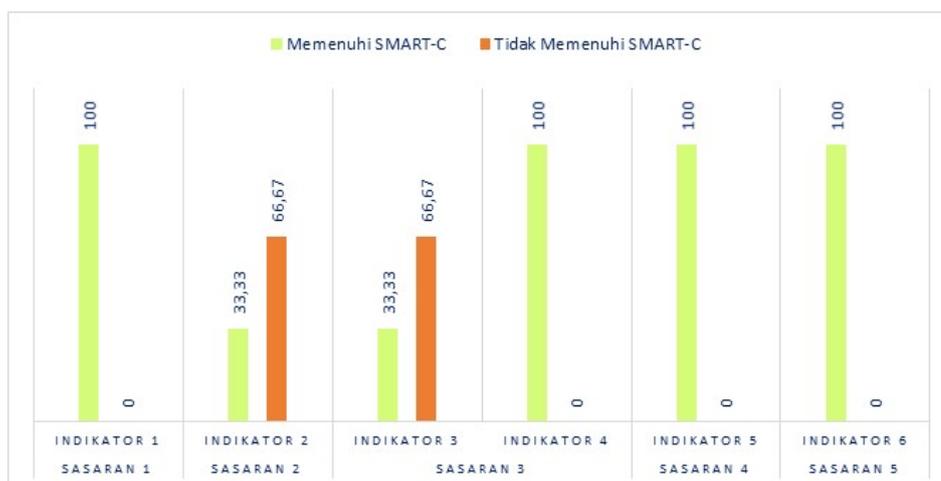


Gambar 6. Persentase Penilaian Sasaran Deputi TEN

Terdapat 3 sasaran dari 5 sasaran memiliki tingkat kesesuaian paling tinggi yaitu sasaran 1, 4, dan 5 sebesar 100%, karena seluruh indikatornya telah memenuhi seluruh kriteria SMART-C. Sedangkan sasaran 2 memiliki tingkat kesesuaian paling kecil sebesar 33,33%. Tingkat kesesuaian sasaran 3 sebesar 66,67%.

Hasil analisis kesesuaian indikator terhadap kriteria SMART-C pada Renstra Deputi TEN menunjukkan 4 dari 6 (66,67%) indikator telah memenuhi seluruh kriteria SMART-C yaitu indikator 1 pada sasaran 1, indikator 4 pada sasaran 3, indikator 5 pada sasaran 4, dan indikator 6 pada sasaran 5.

Indikator yang memiliki tingkat kesesuaian rendah terhadap sasaran kriteria SMART-C pada Renstra Deputi TEN menunjukkan bahwa indikator 2 dan 3 sebesar 33,33%. Penilaian indikator Deputi TEN secara rinci dijelaskan pada Gambar 4.7.



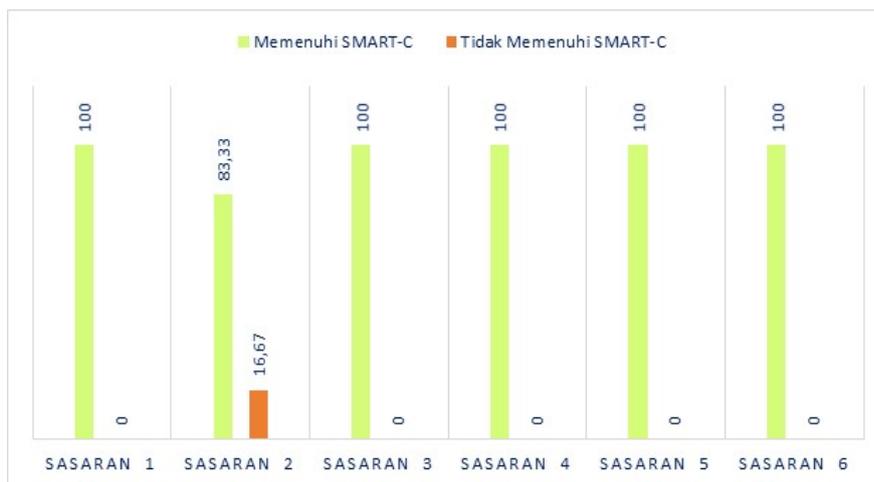
Gambar 7. Persentase Penilaian Indikator Deputy TEN

Analisis Keselarasan Antara Indikator dan Sasaran Deputy PTN

Sasaran Renstra Deputy PTN 2015-2019 memiliki 6 Sasaran dan 15 Indikator, disajikan dalam Tabel 3.

Tabel 3. Indikator dan Sasaran Deputy PTN

SASARAN		INDIKATOR	
1	Meningkatnya kepakaran menuju keunggulan BATAN	1	Jumlah Pusat Unggulan Iptek (PUI)
		2	Jumlah publikasi ilmiah pada jurnal terakreditasi
2	Meningkatnya efektivitas diseminasi dan promosi iptek nuklir	3	Persentase penerimaan masyarakat terhadap iptek nuklir di Indonesia
		4	Jumlah hasil litbangyasa iptek nuklir yang dikomersialkan
		5	Jumlah mitra pengguna yang memanfaatkan hasil litbangyasa iptek nuklir
		6	Jumlah daerah yang memanfaatkan hasil litbang iptek nuklir
		7	Luas lahan pertanian yang menggunakan varietas unggul BATAN
3	Meningkatnya hasil litbangyasa iptek nuklir bidang pangan yang siap dimanfaatkan oleh masyarakat	8	Persentase pembangunan iradiator untuk pengawetan bahan pangan
4	Meningkatnya hasil litbangyasa iptek nuklir bidang kesehatan yang siap dimanfaatkan oleh masyarakat	9	Jumlah radioisotop yang siap dimanfaatkan oleh masyarakat
		10	Jumlah kit radiofarmaka yang siap dimanfaatkan oleh masyarakat
		11	Jumlah prototipe rekayasa perangkat nuklir di bidang kesehatan yang siap dimanfaatkan
5	Meningkatnya hasil litbangyasa iptek nuklir bidang industri yang siap dimanfaatkan oleh masyarakat	12	Jumlah prototipe rekayasa perangkat nuklir di bidang industri yang siap dimanfaatkan oleh masyarakat
		13	Jumlah <i>prototipe advanced</i> NDI yang siap dimanfaatkan industri
6	Meningkatnya kualitas layanan BATAN	14	Indeks Implementasi <i>e-government</i>
		15	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) layanan pemanfaatan iptek nuklir di bidang energi, isotop dan radiasi

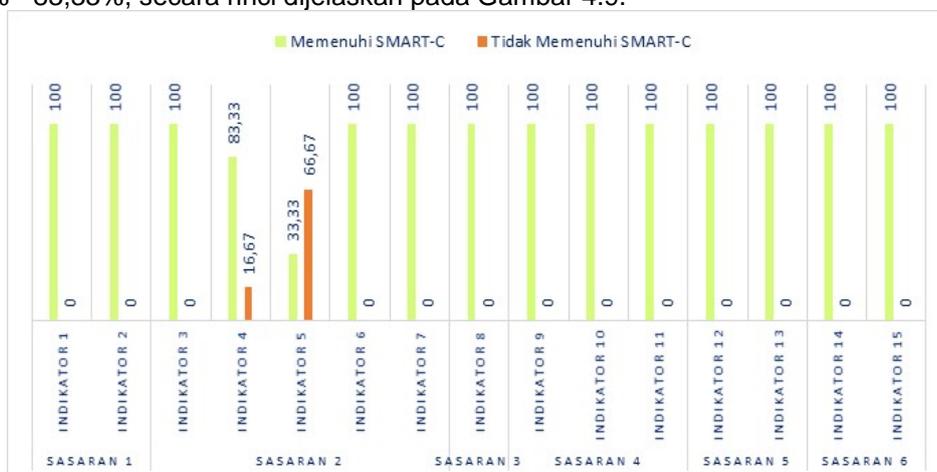


Gambar 8. Persentase Penilaian Sasaran Deputy PTN

Terdapat 5 sasaran dari 6 sasaran memiliki tingkat kesesuaian paling tinggi yaitu sasaran 1, 3, 4, 5 dan 6 sebesar 100%, karena seluruh indikatornya telah memenuhi seluruh kriteria SMART-C. Sedangkan sasaran 2 memiliki tingkat kesesuaian paling kecil sebesar 83,33%.

Hasil analisis kesesuaian indikator terhadap kriteria SMART-C pada Renstra Deputy PTN menunjukkan 13 dari 15 (86,67%) indikator telah memenuhi seluruh kriteria SMART-C yaitu indikator 1 dan 2 pada sasaran 1, indikator 3, 6, dan 7 pada sasaran 2, indikator 8 pada sasaran 3, indikator 9, 10, dan pada sasaran 4, indikator 12 dan 13 pada sasaran 5, indikator 14 dan 15 pada sasaran 6.

Indikator yang memiliki tingkat kesesuaian terendah terhadap sasaran kriteria SMART-C pada Renstra Deputy PTN menunjukkan bahwa indikator 5 sebesar 33,33% dan indikator 4 sebesar 83,33%. Penilaian indikator Deputy PTN memiliki tingkat kesesuaian rendah antara 33,33% - 83,33%, secara rinci dijelaskan pada Gambar 4.9.



Gambar 9. Persentase Penilaian Indikator Deputy PTN

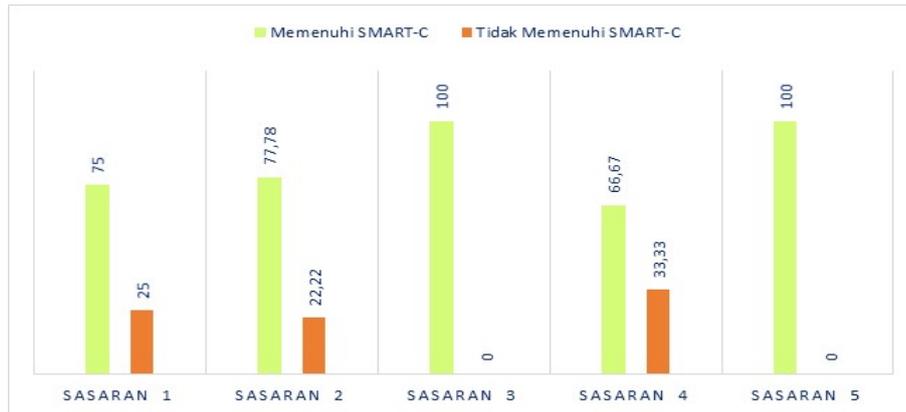
Analisis keselarasan antara Indikator dan Sasaran Sestama

Sasaran Renstra Sestama 2015-2019 memiliki 6 Sasaran dan 15 Indikator, disajikan dalam Tabel 4.7.

Tabel 4.7. Indikator dan Sasaran Sestama

SASARAN		INDIKATOR	
1	Meningkatnya kinerja manajemen kelembagaan menuju keunggulan BATAN	1	Jumlah dokumen kerja sama pengguna pusat unggulan iptek BATAN
		2	Jumlah kerja sama yang mengacu pada dokumen Country Programme Framework (CPF) Indonesia - IAEA
		3	Hasil evaluasi akuntabilitas Kinerja BATAN

	SASARAN		INDIKATOR
			dengan predikat Sangat Baik. <i>Catatan:</i> - Hasil penilaian Laporan Kinerja BATAN dengan predikat Sangat Baik - Nilai Lakin oleh kemenpanRB pada tahun N-1
		4	Persentase berkurangnya jumlah temuan yang berindikasi kerugian negara
		5	Hasil penilaian kinerja keuangan dalam opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
		6	Jumlah Dokumen Pedoman Penerapan Iptek Nuklir
		7	Jumlah Rancangan Peraturan tentang Clearing House Iptek Nuklir
		8	Indeks Reformasi Birokrasi BATAN. <i>Catatan:</i> - Sestama tidak dimasukan - Penilaian indeks RB-BATAN tahun N-1
2	Meningkatnya kualitas SDM iptek nuklir	9	Akreditasi tiga program studi Sekolah Tinggi Teknologi Nuklir oleh BAN PT
		10	Jumlah SDM nasional dan regional yang mengikuti pelatihan di bidang nuklir <i>Catatan:</i> Persentase Kelulusan SDM yang mengikuti diklat di bidang nuklir
		11	Jumlah SDM BATAN yang meningkat keahlian dan kompetensinya
3	Meningkatnya jumlah standar di bidang nuklir	12	Jumlah Standar Nasional Indonesia (SNI) bidang nuklir.
		13	Jumlah Standar BATAN (SB) <i>Catatan:</i> Persentase Unit Kerja yang Menerapkan SB
4	Meningkatnya jumlah paten hasil litbangyasa BATAN <i>Catatan:</i> Sasaran ini tidak masuk dalam sestama namun kedeputusan	14	Jumlah paten granted hasil litbangyasa BATAN <i>Catatan:</i> Indikator ini masuk ke indikator masing-masing deputi dengan tidak membatasi hanya paten namun bisa merk, rahasia dagang, hak cipta design industri, pvt dll
5	Meningkatnya kualitas layanan BATAN	15	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) layanan pendidikan, pelatihan, dan standarisasi <i>Catatan:</i> Indeks Kepuasan Unit Kerja terhadap layanan Settama (Kerjasama, Paten, PVT, Perpu, Etical Clearence, layanan perencanaan, layanan kepegawaian dll)

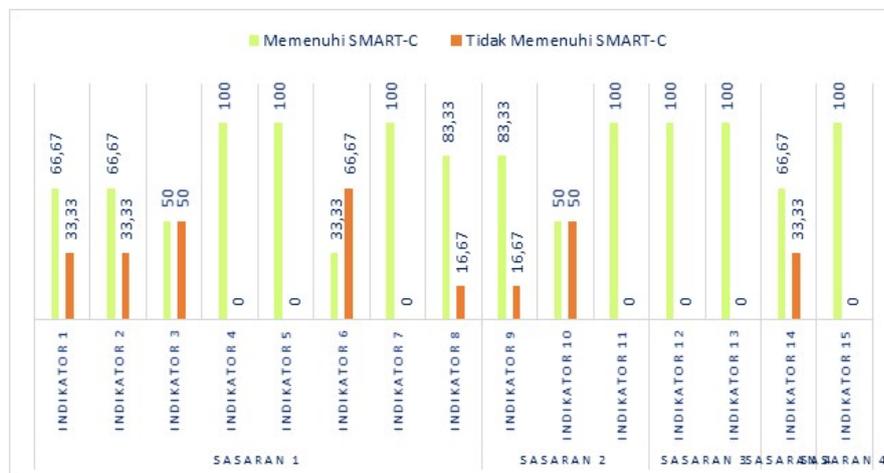


Gambar 4.10. Persentase Penilaian Sasaran Sestama

Terdapat 2 sasaran dari 5 sasaran memiliki tingkat kesesuaian paling tinggi yaitu sasaran 3 dan 5 sebesar 100%, karena indikatornya telah memenuhi seluruh kriteria SMART-C. Sedangkan sasaran 4 memiliki tingkat kesesuaian paling rendah sebesar 66,67%. Tingkat kesesuaian sasaran 1 sebesar 75%, dan sasaran 2 sebesar 77,78%.

Hasil analisis kesesuaian indikator terhadap kriteria SMART-C pada Renstra Sestama menunjukkan 7 dari 15 (46,67%) indikator telah memenuhi seluruh kriteria SMART-C yaitu indikator 4, 5, dan 7 pada sasaran 1, indikator 11 pada sasaran 2, indikator 12 dan 13 pada sasaran 3, indikator 15 pada sasaran 5 sebesar 100%.

Indikator yang memiliki tingkat kesesuaian terendah terhadap sasaran kriteria SMART-C pada Renstra Sestama menunjukkan bahwa indikator 6 sebesar 33,33%, sedangkan kesesuaian rendah lainnya pada indikator 3 dan 10 sebesar 50%, dan indikator 1, 2, dan 14 sebesar 66,67%, indikator 8 dan 9 sebesar 83,33%. Penilaian indikator Sestama memiliki tingkat kesesuaian rendah antara 33,33% - 83,33%, secara rinci dijelaskan pada Gambar 11.



Gambar 4.11. Persentase Penilaian Indikator Sestama

KESIMPULAN

Persentase indikator Deputy SATN yang memenuhi seluruh kriteria SMART-C adalah sebesar 76,47%, masih ada 4 indikator yang belum memenuhi seluruh kriteria SMART-C, dengan rincian sebagai berikut: (1) Pada sasaran 1, 4, 5, dan 6 Deputy SATN, seluruh indikator memenuhi kriteria SMART-C. (2) Pada sasaran 2 Deputy SATN, indikator belum memenuhi kriteria SMART-C. (3) Pada sasaran 3 Deputy SATN, indikator 5, 7, dan 8 belum memenuhi kriteria SMART-C.

Persentase indikator Deputy TEN yang memenuhi seluruh kriteria SMART-C adalah sebesar 66,67%, masih ada 2 indikator yang belum memenuhi seluruh kriteria SMART-C, dengan rincian sebagai berikut: (1) Pada sasaran 1, 4 dan 5 Deputy TEN, seluruh indikator

memenuhi kriteria SMART-C. (2) Pada sasaran 2 Deputy TEN, indikator belum memenuhi kriteria SMART-C. (3) Pada sasaran 3 Deputy TEN, indikator 3 belum memenuhi kriteria SMART-C.

Persentase indikator Deputy PTN yang memenuhi seluruh kriteria SMART-C adalah sebesar 86,67%, masih ada 2 indikator yang belum memenuhi seluruh kriteria SMART-C, dengan rincian sebagai berikut: (1) Pada sasaran 1, 3, 4, 5, dan 6 Deputy PTN seluruh indikator memenuhi kriteria SMART-C. (2) Pada sasaran 2, indikator 4 dan 5 Deputy PTN belum memenuhi kriteria SMART-C.

Persentase indikator Sestama yang memenuhi seluruh kriteria SMART-C adalah sebesar 46,67%, masih ada 8 indikator yang belum memenuhi seluruh kriteria SMART-C, dengan rincian sebagai berikut: (1) Pada sasaran 3 dan 5 Sestama, seluruh indikator memenuhi kriteria SMART-C. (2) Pada sasaran 1 Sestama, indikator 1, 2, 3, 6 dan 8 belum memenuhi kriteria SMART-C. (3) Pada sasaran 2 Sestama, indikator 9 dan 10 belum memenuhi kriteria SMART-C. (4) Pada sasaran 4 Sestama, indikator 14 belum memenuhi kriteria SMART-C.

REKOMENDASI

Pada penyusunan sasaran dan indikator Renstra Deputy SATN 2020-2024 periode berikutnya agar dirancang memenuhi kriteria SMART-C. Jika sasaran dan indikator pada periode Renstra 2015-2019 akan digunakan kembali, maka: (1) Pada sasaran 1, 4, 5, 6, 7 dan 8 Deputy SATN, seluruh indikatornya dapat ditinjau kembali. (2) Pada sasaran 2 Deputy SATN, indikator perlu diperbaiki. (3) Pada sasaran 3 Deputy SATN, indikator 5, 7, dan 8 perlu diperbaiki.

Pada penyusunan sasaran dan indikator Renstra Deputy TEN 2020-2024 periode berikutnya agar dirancang memenuhi kriteria SMART-C. Jika sasaran dan indikator pada periode Renstra 2015-2019 akan digunakan kembali, maka: (1) Pada sasaran 1, 4 dan 5 Deputy TEN, seluruh indikatornya dapat ditinjau kembali. (2) Pada sasaran 2 Deputy TEN, indikatornya perlu diperbaiki. (3) Pada sasaran 3 Deputy TEN, indikator 3 perlu diperbaiki.

Pada penyusunan sasaran dan indikator Renstra Deputy PTN 2020-2024 periode berikutnya agar dirancang memenuhi kriteria SMART-C. Jika sasaran dan indikator pada periode Renstra 2015-2019 akan digunakan kembali, maka: (1) Pada sasaran 1, 3, 4, 5, dan 6 Deputy PTN seluruh indikator dapat ditinjau kembali. (2) Pada sasaran 2, indikator 4 dan 5 Deputy PTN perlu diperbaiki.

Pada penyusunan sasaran dan indikator Renstra Sestama 2020-2024 periode berikutnya agar dirancang memenuhi kriteria SMART-C. Jika sasaran dan indikator pada periode Renstra 2015-2019 akan digunakan kembali, maka: (1) Pada sasaran 3 dan 5 Sestama, seluruh indikator dapat ditinjau kembali, (2) Pada sasaran 1 Sestama, indikator 1, 2, 3, 6 dan 8 perlu diperbaiki, (3) Pada sasaran 2 Sestama, indikator 9 dan 10 perlu diperbaiki, (4) Pada sasaran 4 Sestama, indikator 14 perlu diperbaiki.

UCAPAN TERIMA KASIH, ARIAL 10 BOLD

Penulis mengucapkan terima kasih kepada kepala Biro Perencanaan Bapak Ir. Ferly Hermana, MM dan Kepala Bagian Evaluasi dan Monitoring Program Bapak Imawan Alfin, SH yang telah mengizinkan untuk melakukan kajian ini. Selain itu penulis juga ingin mengucapkan terima kasih rekan-rekan di Bagian Perencanaan Program dan Evaluasi dan Monitoring Program atas segala bantuan, motivasi serta dukungan, hingga selesainya makalah ini.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Susanto, Nurhadi, Materi pelatihan MAP UGM: Kerangka Regulasi dan Kelembagaan Dalam Renstra K/L. Magister Administrasi Publik UGM, Yogyakarta (2018).
- [2] Internet: <https://www.maxmanroe.com/vid/manajemen/pengertian-perencanaan.html>, pengertian perencanaan.M.Prawiro.
- [3] Wheelen, T.L. and Hunger, D.J., *Strategic management and business policy. Achieving sustainability*, 12th Edition, New Jersey: Prentice – Hall. (2010).
- [4] Arikunto. Suharsimi, 2004, *Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan*, Jakarta: Bumi Aksara.
- [5] Burt & Nanus, 1992, *Visionary Leadership, Creating a compelling sense of direction for your organization*, San Fransisco:Jossey-Bass Publishers.
- [6] Gibson, J.L, Ivan Cevich and Donelly, 1995, *Organisasi dan Manajemen: Perilaku, Struktur, dan Proses*. Jakarta: Erlangga
- [7] Dunn, William N, 2003, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press

-
- [8] Goetsch and Davis, 1997, *Quality Management for Organizational Excellence: Introduction to Total Quality*, 8th Edition, Walton: University of West Florida and Oskaloosa
 - [9] Horton, Paul B; Hunt, Chester L, 1996, *Sosiologi*, Jakarta: Erlangga
 - [10] Imron, Ali, 2002, *Kebijaksanaan Pendidikan di Indonesia*, Jakarta: PT Bumi Aksara
 - [11] Kotler, Nawawi, 2000, Kotler, Philip, dan Kevin Lane Keller, 2009, *Manajemen Pemasaran Jilid 2*, edisi Ketiga Belas, Terjemahan Bob Sabran, MM. Jakarta: Penerbit Erlangga
 - [12] Kuncoro, Mudrajad, 2005, *Strategi Bagaimana meraih keunggulan kompetitif*, Jakarta: Erlangga
 - [13] Nugroho, Riant. D, 2011, *Public Policy: Dinamika Kebijakan-Analisis Kebijakan-Manajemen Kebijakan*, Jakarta: PT. Elex Media Komputindo
 - [14] Siagian, Sondang P, 1986, *Analisis serta perumusan kebijaksanaan dan strategi organisasi*, Jakarta: Gunung Agung
 - [15] Soekanto, Soerjono, 1983, *Kamus Sosiologi*, Jakarta: CV Rawajali
 - [16] Soemohadiwidjojo, Arini, (2015): *Panduan Praktis Menyusun KPI (Key Performance Indicator)*, Jakarta: Raih Asa Sukses
 - [17] Fred R. David, (2011): *Management Strategic Model*: New Jersey Prentice Hall Publishing.
 - [18] Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 - [19] Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025.